



## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



# RENCANA KERJA (RENJA) 2023

Jalan Pulau Lepar, Komplek Perkantoran Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang 33149  
TELP : 0717 4262141 – 0717 4262142 WEB : [HTTP//KOMINFO.BABELPROV.GO.ID](http://KOMINFO.BABELPROV.GO.ID)  
FAX : 0717 4262143 EMAIL : [KOMINFO@BABELPROV.GO.ID](mailto:KOMINFO@BABELPROV.GO.ID)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 telah selesai disusun dengan baik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 – 2026, maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Usulan dan saran perbaikan sangat kami harapkan atas Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Pangkalpinang, Juli 2022

Kepala  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI  
NIP. 19640915 199002 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>		<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>		<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>		<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>		<b>v</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>7</b>
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
	2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat	44
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	45
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	54
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>57</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persandingan Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022	9
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	41
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

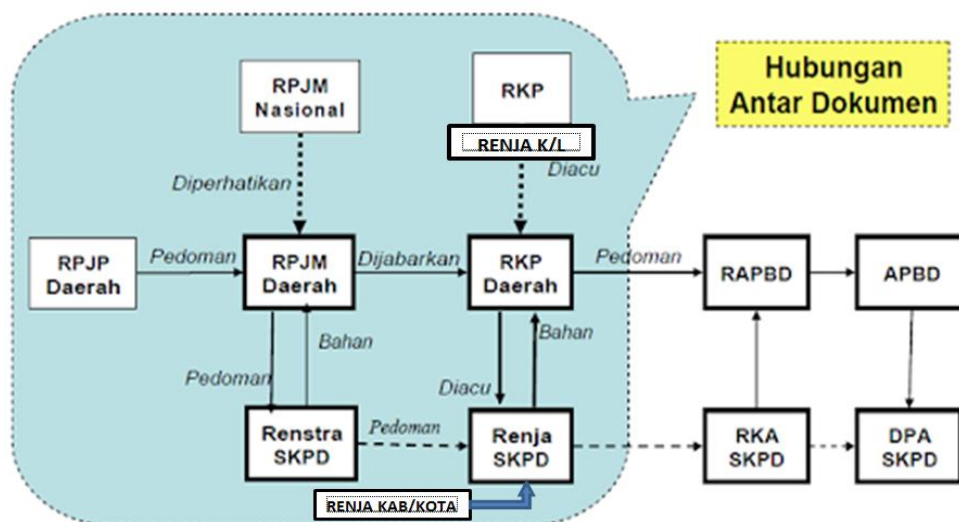
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2023 dan dengan meninjau hasil evaluasi pelaksanaan serta capaian kinerja pada Renja Diskominfo sebelumnya.

Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan infrastruktur TIK, sumber daya manusia dengan kompetensi TIK, Single Data System (SDS) Kepulauan Bangka Belitung dan terwujudnya smart province Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia. Hal tersebut bertujuan dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Renja PD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dimana RKPD dijadikan dasar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sedangkan Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat

Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dilihat dalam gambar di bawah ini :



**Gambar I.1**  
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat daerah disusun dengan tahapan: (1). persiapan penyusunan; (2). penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum /lintas bidang; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2023-2026 sehingga prioritas sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan diarahkan pada pencapaian target akhir Renstra. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu dan saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.



Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik, dan Persandian menjadi sektor Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membangun Kepulauan Bangka Belitung. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi serta komunikasi publik, Pengelolaan Aplikasi Informatika, penyelenggaraan statistik sektoral, persandian dan keamanan Informasi serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050\_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
  13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);



17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 73 Seri F).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika, Persandian serta Statistik Tahun 2023.
2. Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Komunikasi dan Informatika, Persandian serta Statistik Tahun 2023 yang sinergis dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2013-2026

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menentukan prioritas program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun 2023;
3. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Komunikasi, Informatika, Persandian, Statistik antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 dirumuskan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Gambaran kinerja Diskominfo diperoleh dari evaluasi capaian kinerja dan *e-Controlling* hingga tahun 2022 triwulan I. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 hingga triwulan I selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Persandingan Program Prioritas Perangkat Daerah**  
**Tahun 2020 dan Tahun 2021**

No	Bidang Urusan	Program Prioritas Diskominfo	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4
1	Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		PROGRAM PENGEMBANGN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KAMUNIKASI	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT	
2	Statistik	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAN KETERBUKAAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
3	Persandian	PROGRAM PENINGKATAN PERSANDIAN DAEAH DAN KEAMANAN INFORMASI DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Tabel 2.2  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN  
 PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERANGKAT DAERAH :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2	16														
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>													
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangat Daerah (DISKOMINFO)	80	78.00	Rp 12,247,533,543.00	74.00	Rp 11,320,876,968.00	94.87%	80.00	80.00	100%
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (DKP)	12	12	Rp 98,743,861.00	12	Rp 91,035,800.00	100%	12	12	100%

2	16	01	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5	5	Rp 53,927,695	5	Rp 48,436,000	100%	5	5	100%
2	16	01	1.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	Rp -	-	Rp -		0	0	#DIV/0!
2	16	01	1.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	Rp -	-	Rp -		0	0	#DIV/0!
2	16	01	1.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	Rp -	-	Rp -		0	0	#DIV/0!
2	16	01	1.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	Rp -	-	Rp -		0	0	#DIV/0!
2	16	01	1.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	Rp -	-	Rp -		0	0	#DIV/0!
2	16	01	1.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	Rp 44,816,166	7	Rp 42,599,800	100%	7	7	100%
						Survey Kepuasan Pelayanan Internal (Diskominfo)	100	100		100		100%	100	100	100%
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan keuangan (Diskominfo)	60	100	7,760,441,858	100	7,101,737,907	100%	60	60	100.00%

2	16	01	1.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60		55	Rp 7,642,413,470	55	7,016,231,657	100%	60	60	100.00%
2	16	01	1.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200		2	Rp 86,800,000	2	54,700,000	100%	200	200	100.00%
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200		1	Rp 28,850,000	1	28,546,250	100%	200	200	100.00%
2	16	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2		1	2,378,388	1	2,260,000	100%	2	2	100.00%
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10		12	0	12		100%	10	10	100.00%
2	16	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5		0	0	0			5	5	100.00%
2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2		12	0	12		100%	2	2	100.00%



2	16	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	0	0	0	2	2	100.00%
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>1.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan peraturan</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100.00%</b>
2	16	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	0	0	0	2	2	100.00%
2	16	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2	0	0	0	2	2	100.00%
2	16	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	0	0	0	2	2	100.00%
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>1.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian (Diskominfo)</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100.00%</b>
2	16	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3	0	0	0	3	3	100.00%
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70	0	0	0	70	70	100.00%

2	16	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3		0	0	0		3	3	100.00%	
									0	0						
2	16	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi pepegawaian	3		0	0	0		3	3	100.00%	
									0	0						
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan	10		0	0	0		10	10	100.00%	
									0	0						
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (Diskominfo)</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administras Umum Perangkat Daerah (Diskominfo)</b>	<b>78</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310,930,729</b>	<b>300,472,397</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100.00%</b>	
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3		25	25	Rp 9,957,092	9,150,000	100%	3	3	100.00%
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5		5	5	Rp 39,803,780	39,674,547	100%	5	5	100.00%
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4		8	8	Rp 43,599,427	42,026,000	100%	4	4	100.00%
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4		4	4	20,482,430	20,339,500	100%	4	4	100.00%

2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	40,150,000	3	35,134,000	100%	3	3	100.00%
2	16	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	0	0	0	0	0%	2	2	100.00%
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	447	10,015,000	447	9,405,000	100%	15	15	100.00%
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	140	146,923,000	140	144,743,350	100%	4	4	100.00%
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>1.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskominfo)</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah urusan Pemerintah yang diadakan (Diskominfo)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>60,000,000</b>	<b>4</b>	<b>59,906,000</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100.00%</b>
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	0	0	0	0	0.00%	4	4	100.00%
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	4	60,000,000	4	59,906,000	100.00%	3	3	100.00%
2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	0	0	0	0	0	3	3	100.00%
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(Diskominfo)</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(Diskominfo)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3,763,158,000</b>	<b>4</b>	<b>3,607,282,310</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100.00%</b>

2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12		12	10,858,000	12	6004000	100%	12	12	100.00%
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12	2,357,400,000	12	2,220,878,310	100%	12	12	100.00%
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		0	0	0	0		12	12	100.00%
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12	1,394,900,000	12	1,380,400,000	100%	12	12	100.00%
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Diskominfo)</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang di pelihara (Diskominfo)</b>	<b>9</b>		<b>9</b>	<b>254,259,095</b>	<b>9</b>	<b>160,442,554</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100.00%</b>
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1		0	0	0	0	0%	1	1	100.00%
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3		3	100,514,900	3	56,845,714	100%	3	3	100.00%

2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20		20	32,146,845	20	24,111,000	100%	20	20	100.00%
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2		2	56,550,000	2	36,668,840	100%	2	2	100.00%
2	16	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2		2	65,047,350	2	42,817,000	100%	2	2	100.00%
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6		2	0	2	0		6	6	100.00%
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											
2	16	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik	100		95	10,307,950,084	95	9,937,988,589	100%	100	100	100.00%
2	16	02	1.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemda Provinsi	Presentase penyebarluasan informasi kebijakan/program/kegiatan pimpinan dan perangkat daerah melalui saluran komunikasi yang tersedia	70		60	10,307,950,084	60	9,937,988,589	100%	70	70	100.00%

2	16	02	1.01	02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12	0	0			12	12	100.00%
2	16	02	1.01	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3	3	5,805,138,290	3	5,583,637,288	3	3	100.00%
2	16	02	1.01	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4	4	529,165,568	4	458,408,388	4	4	100.00%
2	16	02	1.01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3	3	1,628,466,991	3	1,585,045,067	3	3	100.00%
2	16	02	1.01	11	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1	0		0		1	1	100.00%
2	16	02	1.01	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3	3	2,345,179,235	3	2,310,897,846	3	3	100.00%
2	16	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik.</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>2,078,149,627</b>	<b>90</b>	<b>2,041,869,340</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100.00%</b>



2	16	03	1.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD layanan administrasi dan layanann publik yang memanfaatkan domain dan subdomain Pemda.	70		60	421,988,000	60	408,992,535	70	70	100.00%
2	16	03	1.01	01	Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	10		10	76,778,000	10	76,522,035	10	10	100.00%
2	16	03	1.01	02	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	2		0	-	0	-	2	2	100.00%
2	16	03	1.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	34		32	345,210,000	32	332,470,500	34	34	100.00%
2	16	03	1.02		Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provins	Presentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	50		20	1,656,161,627	15	1,632,876,805	50	50	100.00%

2	16	03	1.02	02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	0	0	0	0	1	1	100.00%
2	16	03	1.02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	1	1,381,660,530	1	1,359,264,005	1	1	100.00%
2	16	03	1.02	04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	1	0	1		1	1	100.00%
2	16	03	1.02	07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1	1	224,500,000	1	224,045,000	1	1	100.00%
2	16	03	1.02	08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	0	0	0		1	1	100.00%

2	16	03	1.02	10	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1		1	50,001,097		49,567,800		1	1	100.00%
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>											
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	60		75	240,774,987		231,384,987		60	60	100.00%
2	20	02	1.01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi</b>	Persentase OPD yang menghasilkan data sesuai Prinsip satu data Indonesia	75		70	240,774,987		231,384,987		75	75	100.00%
2	20	02	1.01	01	SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1		1	164,939,574		156,428,950	100%	1	1	100.00%

2	20	02	1.01	03	SubKegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	10	20	75,835,413	15	74,956,037	75%	10	10	100.00%
2	20	02	1.01	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	68	0	-	0			68	68	100.00%
2	20	02	1.01	06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	100	0	-	0			100	100	100.00%
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>										
2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	3	3	559,048,901	2	178,736,835		3	3	100.00%
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan Proteksi Keamanan Informasi Pemerintah	75	70	500,776,000	55	146,008,253	78.57%	75	75	100.00%

2	21	02	2.01	01	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	3		3	300,000,000	0	0	0%	3	3	100.00%
2	21	02	2.01	03	sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1		10	116,004,000	10	77,186,358	100%	1	1	100.00%
2	21	02	2.01	04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1		4	84,772,000	4	68,821,895	100%	1	1	100.00%
						Jumlah Laporan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	1		0		0			1	1	100.00%
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan CSIRT Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	1		0		0			1	1	100.00%

2	21	02	2.02		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Presentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi	85		85	58,272,901	85	32,728,582		85	85	100.00%
2	21	02	2.02	01	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	27		34	58,272,901	34	32,728,582	100%	27	27	100.00%



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara. Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Capaian indikator program selama 5 (lima) tahun terkait urusan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat		Jumlah capaian layanan yang diterima masyarakat	20%	40%	60%	80%	100%	78.75%	90%	95.00%	100.00%	Renstra 2017-2022
2	Meningkatnya jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk layanan pemerintah dan layanan public		Jumlah jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk layanan pemerintah dan layanan public	15%	35%	60%	80%	100%	96%	100%	100%	100%	Renstra 2017-2022
3	Meningkatnya data dan informasi yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan		Jumlah data dan informasi yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan	60%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra 2017-2022
4	Meningkatnya penerapan e- Government di Provinsi Kep Babel		Jumlah penerapan e- Government di Provinsi Kep Babel	20%	40%	60%	80%	100%	96%	100%	100%	100%	Renstra 2017-2022
5	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik		Jumlah capaian layanan informasi dan komunikasi publik	65%	75%	80%	80%	100%	92%	95%	100%	100%	Renstra 2017-2022

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1. Koordinasi dan Sinergi Tingkat Kinerja Pelayanan Diskominfo.**

Salah satu Program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencapai Misi 3. Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab./Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, Sehingga Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dengan mengedepankan layanan yang terintegrasi sehingga dapat tercapai efisiensi dalam kelembagaan, dan system manajemen sumber daya aparatur yang baik. Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun kebijakan strategis yang sesuai dengan implementasi misi kedua yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut antara lain dengan “ meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik serta dengan memperkuat keamanan informasi

### **2.3.2. Permasalahan dan Hambatan**

Berdasarkan gambaran tugas pokok dan fungsi pelayanan Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Perlunya peningkatan optimalisasi penerapan kebijakan internal, tata kelola dan layanan SPBE;

2. Perlunya Keterbukaan Informasi komunikasi public yang akan menjadi unsur penilaian pencapaian kinerja;
3. Perlunya penerapan strategi dan optimalisasi media komunikasi public;
4. Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah;
5. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral melalui desiminasi open data;
6. Perlunya peningkatan keamanan informasi sesuai sertifikasi standar internasional;

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung kinerja program pembangunan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan antara lain:

1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;
2. Dalam optimalisasi tata Kelola pelaksanaan SPBE perlunya dukungan bukan hanya anggaran tetapi juga dukungan pendampingan jasa Konsultan;
3. Pemanfaatan Sertifikasi elektronik yang belum optimal;
4. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.

### **2.3.3. Tantangan dan Peluang**

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan :
  - a. Kesenjangan informasi di masyarakat Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. Pesatnya perkembangan TIK;
  - c. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Kepulauan Bangka Belitung;
  - d. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung terhadap TIK;

- e. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui Single Data System;
  - f. Tuntutan keterbukaan data dan informasi;
  - g. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.
2. Peluang :
- a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Kepulauan Bangka Belitung berbasis teknologi informasi;
  - b. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. Kesadaran masyarakat Kepulauan Bangka Belitung akan pentingnya data, informasi dan komunikasi;
  - d. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis elektronik;
  - e. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan daerah.

#### **2.3.4. Isu-Isu Penting**

Isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat tergambarkan melalui isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebagai berikut:

- a. Perlunya dukungan dari jasa konsultan dalam optimalisasi penerapan kebijakan internal, tata kelola dan layanan SPBE;

- b. Belum adanya keseragaman standar harga untuk publikasi untuk media massa antara provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Belum terbangunnya single data dan big data centre yang terintegrasi, sehingga kebutuhan data untuk melengkapi layanan informasi dan komunikasi publik masih mengandalkan kontribusi dari OPD dan instansi terkait yang terkadang terlambat;
- d. Belum adanya standarisasi data sektoral dan meta data baku untuk data statistik sektoral, menyebabkan validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data statistik sektoral belum optimal;
- e. Belum semua aplikasi pengolah data di SKPD terintegrasi dalam aplikasi Single Data System;
- f. Kurangnya sosialisasi informasi public kepada masyarakat dari badan public;
- g. Sarana pendukung keamanan informasi belum memadai (SDM Teknis Keamanan Informasi, peralatan dan regulasi);
- h. Awareness dan dukungan keamanan informasi dari pimpinan hingga pelaksana yang masih kurang, sehingga sinergitas dan persamaan visi/persepsi pengelolaan dan penyelenggaraan keamanan informasi belum terbangun;
- i. Belum optimalnya penggunaan Sertifikat Elektronik.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dari

rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai urusan Dinas Komunikasi dan Informatika .

Rancangan awal RKPD yang ada adalah berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap urusan terkait, isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya. Reviu dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Secara lengkap reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4  
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERANGKAT DAERAH: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				Rp 29,337,037,564.00	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				Rp 29,667,000,000.00	
	<b>NON URUSAN (RUTIN)</b>				Rp 11,580,856,520.00	<b>NON URUSAN (RUTIN)</b>				Rp 12,671,000,000.00	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Pangkalpinang	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	4	Rp 135,000,000.00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Pangkalpinang	Nilai Sakip PD	82.00	Rp 330,000,000.00	
	<b>Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi</b>		Rp 135,000,000.00	<b>Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi</b>		Rp330,000,000	
	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>	5	Rp 100,000,000.00	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>	6	Rp210,000,000	
	<i>Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah dok Evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)</i>	7	Rp 35,000,000.00	<i>Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah dok Evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)</i>	7	Rp120,000,000	
			<b>Indeks kepuasan pelayanan internal (DISKOMINFO)</b>	90	Rp 11,445,856,520.00			<b>Indeks kepuasan pelayanan internal (DISKOMINFO)</b>	90	Rp 12,341,000,000.00	



	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Survey kepuasan pelayanan keuangan (angka)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 6,973,416,520.00</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Indeks kepuasan pelayanan keuangan (Diskominfo)</b>	<b>90</b>	<b>Rp7,730,000,000</b>	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pangkalpinang	Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	55	Rp 6,963,416,520.00	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	60	Rp7,700,000,000	
	<i>Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1	Rp 10,000,000.00	<i>Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	10	Rp30,000,000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan peraturan</b>	<b>17</b>	<b>Rp 50,000,000.00</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan peraturan</b>	<b>17</b>	<b>Rp50,000,000</b>	
	<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	17	Rp 50,000,000.00	<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	17	Rp50,000,000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian (Diskominfo)</b>	<b>90</b>	<b>Rp 195,000,000.00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian (Diskominfo)</b>	<b>90</b>	<b>Rp195,000,000</b>	
	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	3	Rp 25,000,000.00	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	3	Rp25,000,000	

	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	1	Rp 60,000,000.00	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	1	Rp60,000,000
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	3	Rp 5,000,000.00	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	3	Rp5,000,000
	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi pepegawaian</i>	3	Rp 25,000,000.00	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi pepegawaian</i>	3	Rp25,000,000
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan</i>	16	Rp 80,000,000.00	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan</i>	16	Rp80,000,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (Diskominfo)</b>	Pangkalpinang	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administras Umum Perangkat Daerah (Diskominfo)</b>	<b>90</b>	<b>Rp 983,720,000.00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (Diskominfo)</b>	Pangkalpinang	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administras Umum Perangkat Daerah (Diskominfo)</b>	<b>90</b>	<b>Rp626,000,000</b>
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3	Rp 20,000,000.00	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3	Rp20,000,000

	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5	Rp 420,000,000.00	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5	Rp60,000,000	
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4	Rp 20,000,000.00	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4	Rp60,000,000	
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4	Rp 7,000,000.00	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4	Rp45,000,000	
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12	Rp 136,720,000.00	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12	Rp15,000,000	
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	2	Rp 20,000,000.00	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	2	Rp66,000,000	
	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12	Rp 60,000,000.00	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12	Rp60,000,000	
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	Rp 300,000,000.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	Rp300,000,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskominfo)</b>	Pangkalpinang	<b>Jumlah Barang Milik Daerah urusan Pemerintah yang diadakan (Diskominfo)</b>	<b>10</b>	<b>Rp 460,000,000.00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (Diskominfo)</b>	Pangkalpinang	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administras Umum Perangkat Daerah (Diskominfo)</b>	<b>90</b>	<b>Rp630,000,000</b>	

	<i>Pengadaan Mebel</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	3	Rp 20,000,000.00	<i>Pengadaan Mebel</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	3	Rp300,000,000
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4	Rp 420,000,000.00	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4	Rp80,000,000
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	3	Rp 20,000,000.00	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	3	Rp250,000,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(Diskominfo)</b>	Pangkalpinang	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(Diskominfo)</b>	<b>9</b>	<b>Rp 2,160,000,000.00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(Diskominfo)</b>	Pangkalpinang	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(Diskominfo)</b>	<b>9</b>	<b>Rp 2,160,000,000.00</b>
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12	Rp 10,000,000.00	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12	Rp 10,000,000.00
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	Rp 600,000,000.00	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	Rp 600,000,000.00
	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12	Rp 50,000,000.00	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12	Rp 50,000,000.00

	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12	Rp 1,500,000,000.00	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12	Rp 1,500,000,000.00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Diskominfo)</b>	Pangkalpinang	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang di pelihara (Diskominfo)</b>	<b>9</b>	<b>Rp 623,720,000.00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Diskominfo)</b>	Pangkalpinang	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang di pelihara (Diskominfo)</b>	<b>9</b>	<b>Rp 950,000,000.00</b>	
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	1	Rp 20,000,000.00	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	1	Rp 100,000,000	
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	4	Rp 420,000,000.00	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	4	Rp 140,000,000	
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	20	Rp 20,000,000.00	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	20	Rp 60,000,000	
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2	Rp 7,000,000.00	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2	Rp 250,000,000	

	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2	Rp 136,720,000.00	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2	Rp 200,000,000	
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6	Rp 20,000,000.00	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6	Rp 200,000,000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Pangkalpinang	<b>Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 8,176,883,044.00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Pangkalpinang	<b>Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik</b>	<b>100%</b>	<b>Rp10,850,000,000</b>	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemda Provinsi</b>	Pangkalpinang	<b>Presentase penyebaran informasi kebijakan/program/kegiatan pimpinan dan perangkat daerah melalui saluran komunikasi yang tersedia</b>	<b>70%</b>	<b>Rp 8,176,883,044.00</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemda Provinsi</b>	Pangkalpinang	<b>Presentase penyebaran informasi kebijakan/program/kegiatan pimpinan dan perangkat daerah melalui saluran komunikasi yang tersedia</b>	<b>70%</b>	<b>Rp 10,850,000,000.00</b>	

	<i>Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>	12	Rp 214,486,500.00	<i>Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>	12	Rp 50,000,000.00	
	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	3	Rp 214,486,500.00	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	3	Rp 4,200,000,000.00	
	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	4	Rp 3,354,425,272.00	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	4	Rp 1,200,000,000.00	
	<i>Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik</i>	3	Rp 412,286,500.00	<i>Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik</i>	3	Rp 1,500,000,000.00	
	<i>Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	100	Rp 214,486,500.00	<i>Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	100	Rp 200,000,000.00	
	<i>Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah</i>	1	Rp 3,354,425,272.00	<i>Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah</i>	1	Rp 1,200,000,000.00	

	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan</i>	3	Rp 412,286,500.00	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan</i>	3	Rp 2,500,000,000.00	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Pangkalpinang	<b>Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik.</b>	<b>80</b>	<b>Rp 6,183,558,000.00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Pangkalpinang	<b>Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik.</b>	<b>80</b>	<b>Rp5,125,000,000</b>	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Pangkalpinang	<b>Persentase PD layanan administrasi dan layanann publik yang memanfaatkan domain dan subdomain Pemda.</b>	<b>70%</b>	<b>Rp 650,000,000.00</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Pangkalpinang	<b>Persentase PD layanan administrasi dan layanann publik yang memanfaatkan domain dan subdomain Pemda.</b>	<b>70%</b>	<b>Rp610,000,000</b>	
	<i>Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi</i>	10	Rp 500,000,000.00	<i>Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi</i>	10	Rp80,000,000	
	<i>Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	2	Rp 100,000,000.00	<i>Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	2	Rp80,000,000	



	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	34	Rp 50,000,000.00	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	34	Rp450,000,000
	<b>Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Pangkalpinang	<b>Presentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</b>	<b>50%</b>	<b>Rp 5,533,558,000.00</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Pangkalpinang	<b>Presentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</b>	<b>50%</b>	<b>Rp4,515,000,000</b>
	<i>Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	1	Rp 4,483,558,000.00	<i>Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	1	Rp200,000,000
	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola</i>	1	Rp 50,000,000.00	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola</i>	1	Rp3,500,000,000
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>	1	Rp 300,000,000.00	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>	1	Rp350,000,000
	<i>Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>	1	Rp 200,000,000.00	<i>Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>	1	Rp150,000,000

	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>	10	Rp 300,000,000.00	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</i>	Pangkalpinang	<i>Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>	10	Rp200,000,000	
	<i>Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	1	Rp 200,000,000.00	<i>Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	1	Rp115,000,000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>60</b>	<b>Rp 2,545,740,000.00</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>60</b>	<b>Rp305,000,000</b>	
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi</b>	Pangkalpinang	<b>Persentase OPD yang menghasilkan data sesuai Prinsip satu data Indonesia</b>	<b>75%</b>	<b>Rp2,545,740,000</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi</b>	Pangkalpinang	<b>Persentase OPD yang menghasilkan data sesuai Prinsip satu data Indonesia</b>	<b>75%</b>	<b>Rp305,000,000</b>	

	<i>SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	1	Rp 1,075,570,000.00	<i>SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	1	Rp100,000,000	
	<i>SubKegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun</i>	10	Rp 197,300,000.00	<i>SubKegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun</i>	10	Rp80,000,000	
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS</i>	68	Rp 1,075,570,000.00	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS</i>	68	Rp125,000,000	

	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun</i>	100	Rp 197,300,000.00	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun</i>	100	Rp0	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Pangkalpinang	Presentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	65	Rp 850,000,000.00	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Pangkalpinang	Presentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	65	Rp716,000,000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Pangkalpinang	Persentase Penerapan Proteksi Keamanan Informasi Pemerintah	75%	Rp 750,000,000.00	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Pangkalpinang	Persentase Penerapan Proteksi Keamanan Informasi Pemerintah	75%	Rp656,000,000	
	<i>Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan</i>	3	Rp 250,000,000.00	<i>Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan</i>	3	Rp300,000,000	
	<i>sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	1	Rp 350,000,000.00	<i>sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	7 kab/kota	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	1	Rp116,000,000	

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	7 kab/kota	Jumlah Laporan Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Rp 150,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	7 kab/kota	Jumlah Laporan Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Rp240,000,000	
		Jumlah Laporan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	1				Jumlah Laporan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	1		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan CSIRT Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	1				Jumlah Laporan Penyelenggaraan CSIRT Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	1		
<b>Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	Pangkalpinang	<b>Presentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi</b>	<b>85</b>	<b>Rp 100,000,000.00</b>	<b>Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	Pangkalpinang	<b>Presentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi</b>	<b>85</b>	<b>Rp60,000,000</b>	
Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	7 kab/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	27	Rp 100,000,000.00	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	7 kab/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	27	Rp60,000,000	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum PD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Renja tahun 2023, namun sebagian belum dapat terakomodir karena ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan kondisi di lapangan, bukan menjadi skala prioritas, dan keterbatasan anggaran.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

##### 3.1.1. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun ingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2019-2024 akan berfokus pada membangun infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan koneksifitas *broadband* di seluruh wilayah Indonesia, mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan yang didukung oleh sumberdaya manusia digital, memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas polhukhankam melalui akses informasi dan komunikasi publik, mempersiapkan masyarakat secara sosial dan budaya untuk memasuki dunia digital.

Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2019-2024, antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring);
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan;
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Visi Kementrian Komunikasi dan informatika Tahun 2014 - 2019 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong-royong”.

Adapun Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015 - 2019 disusun dengan 4 fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim , energi , ariwisata, industri, infrastruktur, sumberdaya manusia dan wilayah perbatasan.
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sektor* dibidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bindang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik.
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

### **3.1.2 Renstra BSSN RI**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah menyatakan bahwa visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia untuk tahun 2005–2025 adalah : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Untuk



mewujudkan visi tersebut, terdapat 8 (delapan) misi Pembangunan Nasional dan salah satunya adalah misi untuk mewujudkan “Indonesia yang Aman, Damai, dan Bersatu”, yang kemudian ditegaskan bahwa “keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara.” Konsep mengenai “keamanan nasional” yang ditegaskan di dalam RPJPN tersebut sangat penting karena telah menyatukan aspek pertahanan dan keamanan.

Visi-Misi Presiden RI 2019-2024, selanjutnya diterjemahkan dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional yang disebut dengan ‘NAWA CITA’, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia

Peran BSSN RI dalam rangka dukungan pada Prioritas ke -1, prioritas ke-8 dan prioritas ke-9.

## **TUGAS DAN FUNGSI BSSN**

BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanansiber.

## **FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSSN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insidendan/atau serangan siber;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atauserangan siber;
3. Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
4. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan BSSN; dan
8. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

## **Visi dan MISI BSSN**

Visi :

menjadi institusi terpercaya dalam menjaga keamanan Siber dan Sandi Negara dengan menyinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut

serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Misi :

1. Menjamin keamanan informasi di sector pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif
3. Membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industry dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi
4. membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan system identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atauserangan siber dan sandi
5. membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia
6. menyediakan dan mengoptimalkan sumberdaya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

### **Potensi BSSN**

Pembentukan BSSN merupakan langkah strategis dalam meningkatkan ekuatan Negara menghadapi ancaman siber di Indonesia. Pembentukan BSSN berpotensi memperkuat kebijakan di bidang keamanan siber dan sandi seluruh stakeholder di bidang siber, serta menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan mengonsolidasikan masyarakat, akademisi, praktisi, dan komunitas siber di dalam dan luar negeri. Keberadaan BSSN diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan siber Indonesia dalam bentuk koordinasi dan kerjasama antara institusi dan pemangku kepentingan di bidang siber di Indonesia, yang

meliputi Kepolisian Republik Indonesia (cyber crime), TNI/Kementerian Pertahanan (cyber defense), Kementerian Luar Negeri (cyber diplomacy) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tidak tertutup kemungkinan juga dengan lembaga-lembaga lainnya. Potensi BSSN dalam meningkatkan keamanan siber dan sandi sangat besar, mengingat BSSN dapat bekerja sama dengan lembaga keamanan siber di negara-negara maju lainnya. BSSN juga dapat melakukan benchmark to best practice pada lembaga-lembaga keamanan siber di Negara lain yang lebih maju.

Pembentukan BSSN meningkatkan potensi pengembangan SDM yang profesional di bidang keamanan siber di Indonesia. Dalam konteks SDM siber, BSSN berpotensi membangun SDM siber yang profesional dan adaptif terhadap teknologi (technology adaptive) baik untuk kebutuhan internal maupun nasional. Keberadaan BSSN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SDM siber yang menguasai teknologi informasi yang terus berkembang pesat di Indonesia. Adapun dalam konteks kinerja, BSSN berpotensi membangun system manajemen kinerja yang member peluang dan penghargaan kepada inovasi-inovasi baru di bidang keamanan siber di Indonesia. BSSN dapat membangun budaya dan perilaku untuk meningkatkan produktifitas dan profesionalisme SDM dalam bidang keamanan siber dengan menginisiasi pemberian

penghargaan di bidang keamanan siber untuk berbagai organisasi, baik pemerintah maupun swasta bahkan untuk tingkat individu. Pembentukan dan penguatan BSSN juga menciptakan peluang-peluang yang dapat dioptimalkan agar BSSN dapat berperan secara maksimal, diantaranya dalam penyusunan Undang-Undang yang membantu penguatan kewenangan dan dukungan anggaran yang kuat bagi program-program pengamanan siber dan sandi di Indonesia.

### **Tantangan BSSN RI**

BSSN memiliki tantangan besar agar mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. BSSN berada di garis terdepan dalam mengembangkan kapabilitas unggul SDM siber dan sandi sehingga deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan dapat dilaksanakan dengan baik dan akuntabel di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritical nasional (critical infrastructure), dan ekonomi digital (e-commerce).

BSSN di masa depan diharapkan dapat berperan besar dalam memberikan edukasi kepada publik/masyarakat di bidang keamanan siber, dapat mengambil peran penting dalam pengendalian informasi dan berita palsu (hoax) melalui literasi-literasi terkait, serta menjadi juru bicara representatif dalam menghadapi beberapa kejadian nasional di bidang keamanan siber dan menjadi wakil Indonesia di forum-forum siber internasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewenangan BSSN.

Selain melaksanakan tupoksi di bidang keamanan siber, BSSN juga tetap mengemban tupoksi di bidang penyelenggaraan persandian untuk pemerintah atau negara. Dalam konteks revitalisasi persandian, maka BSSN memiliki tantangan untuk tetap melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di seluruh instansi pemerintah, baik di pusat, maupun di daerah, melaksanakan kegiatan terkait analisis sinyal, modernisasi dan sertifikasi peralatan sandi, mengembangkan peralatan sandi karya mandiri, melaksanakan audit persandian secara sistematis dan terintegrasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian kriptografi serta terus melakukan pengembangan standar kriptografi nasional Permasalahan BSSN RI.

Berbagai permasalahan yang ada sehingga di butuhkan peran aktif dari BSSN RI adalah:

1. Jumlah serangan siber terbanyak ke Indonesia adalah virus malware /trojan-activity sebesar 92% dari total 20.033.257 serangan siber (Jan-Mei 2019).
2. Fenomena digitalisasi pada sektor jasa dan keuangan serta meningkatnya pengguna internet dengan penetrasi sebesar 56% (Jan 2019).
3. BSSN hanya memiliki satu sistem monitoring Mata Garuda yang belum mampu mencakup seluruh titik rentan di Indonesia.
4. Belum ada pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan aduan keamanan siber.
5. Belum ada mekanisme integrasi dan sharing data informasi serangan siber antar stakeholder terkait.

### **Tujuan Renstra BSSN RI**

1. Tercapainya fondasi struktur, system dan budaya organisasi BSSN yang kuat.
2. Tersusunnya kebijakan, system dan prosedur berstandar global dalam bidang keamanan siber dan sandi di Indonesia.
3. Tersedianya system manajemen talenta untuk menarik, memelihara dan meretensi SDM siber dan sandi terbaik.
4. Tercapainya kinerja pencegahan, deteksi, mitigasi, dan penanggulangan ancaman keamanan siber dan sandi.
5. Terselenggaranyakerjasama-kerjasama strategis dengan seluruh pihak untuk membangun keamanan siber dan sandi di Indonesia.
6. Terbentuknya kesadaran, perilaku dan budaya keamanan siber yang baik pada setiap warganegara Indonesia.

#### **3.1.3 Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) RI.**

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020. Dalam Renstra tersebut telah pula ditetapkan visi dari Badan Pusat Statistik. Visi BPS Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” (*“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”*) Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional;
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tujuan BPS dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DISKOMINFO PROV. KEP. BANGKA BELITUNG**

Adapun tujuan kinerja pembangunan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan 3 (tiga) sasaran utama yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;
2. Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral;
3. Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE.

Penjabaran tujuan dan sasaran kinerja Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, selengkapnya dapat dilihat pada table III.1.



**TABEL III.1****TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>	<b>TARGET TAHUN 2024</b>
1	2	2	3	4	5
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	2.7	2.8
2		Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	55	70
3		Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	3	3

Sumber: Renstra Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

Sedangkan *relevansi* fokus kebijakan Pemerintah Pusat (K/L) dengan Diskominfo Prov. Kep Bangka Belitung Tahun 2023-2026, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**

**Relevansi Fokus Kebijakan Pemerintah Pusat (K/L) dengan Diskominfo Provinsi Jateng Tahun 2023-2026**

<b>KEMENKOMINFO</b>	<b>BSSN</b>	<b>BPS</b>	<b>DISKOMINFO PROV. KEP. BANGKA BELITUNG</b>
<p>1. Membangun infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan koneksifitas broadband di seluruh wilayah Indonesia;</p> <p>2. Mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan yang didukung oleh sumberdaya manusia digital;</p> <p>3. Memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas polhukhankam melalui akses informasi dan komunikasi public; dan</p> <p>4. Mempersiapkan masyarakat secara sosial dan budaya untuk memasuki dunia digital.</p>	<p>1. Menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;</p> <p>2. Meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi; dan</p> <p>3. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.</p>	<p>1. Menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistic; dan</p> <p>2. Mewujudan Sistem Statistik Nasional dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing, pemerintah daerah dan masyarakat luas, demi terwujudnya koordinasi statistik nasional secara terpadu.</p>	<p>1. Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi;</p> <p>2. Penguatan ketersediaan data sektoral;</p> <p>3. Penguatan persandian dan keamanan informasi;</p> <p>4. Penguatan pengelolaan kualitas penyebaran dan pemerataan informasi publik; dan</p> <p>5. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik.</p>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Berpedoman pada Renstra Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju serta berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Diskominfo tahun lalu dan hasil evaluasi renja Diskominfo tahun berjalan maka Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2023 mengusulkan anggaran Belanja Langsung dari Alokasi APBD Provinsi sebesar Rp. 29.667.000.000,- yang terdiri dari 5 program dan 14 kegiatan. Adapun Nomenklatur Program dan Kegiatan tersebut berdasarkan KEPMENDAGRI NO. 050-5889 tahun 2021 Pemutakhiran permen 90 thn 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel IV.1  
RUMUSAN RENCANA PRIORITAS DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Rencana Tahun 2023							Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Sub Kegiat an	Prog ram	Kelu aran Kegi atan	Hasil Kegi atan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dan a	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		
											Prog ram		Kelu aran Kegi atan		Hasil Kegi atan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	1								Rp 29,667,00 0,000.00						Rp 30,498,50 0,000.00	
2	1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (NON URUSAN)</b>							Rp 12,671,000 ,000.00						Rp 12,971,000 ,000.00	
		Nilai Sakip PD				82			Rp 330,000,0 00.00			82			Rp 360,000,0 00.00	

2	1	0	1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah			13		Rp330,000,000			13		Rp360,000,000
2	1	0	1.	0	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan	Pangkalpinang		6		Rp210,000,000			6		Rp230,000,000
2	1	0	1.	0	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkalpinang		7		Rp120,000,000			7		Rp130,000,000
						Indeks kepuasan pelayanan internal (DISKOMINFO)				90		Rp12,341,000,000.00			90		Rp12,611,000,000.00
2	1	0	1.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks kepuasan pelayanan keuangan (Diskominfo)			90		Rp7,730,000,000			90		Rp7,930,000,000
2	1	0	1.	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji		Jumlah Orang yang Menerima	Pangkalpinang		60		Rp7,700,000,000			12		Rp7,900,000,000

					<i>dan Tunjangan ASN</i>			Gaji dan Tunjangan ASN											
2	1	0	1.	0	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				Pangkalpinang		0						0		Rp0
2	1	0	1.	0	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkalpinang		10		Rp30,000,000				10		Rp30,000,000
2	1	0	1.	0	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan peraturan</b>				17		<b>Rp50,000,000</b>				17		<b>Rp60,000,000</b>
2	1	0	1.	0	<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan	Pangkalpinang		17		Rp50,000,000				17		Rp60,000,000

								Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD											
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1.</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian (Diskominfo)</b>		Pangkalpinang		<b>90</b>		<b>Rp195,000,000</b>				<b>90</b>		<b>Rp195,000,000</b>
2	1	0	1.	0	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pangkalpinang		3		Rp25,000,000				3		Rp25,000,000
2	1	0	1.	0	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pangkalpinang		1		Rp60,000,000				1		Rp60,000,000
2	1	0	1.	0	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pangkalpinang		3		Rp5,000,000				3		Rp5,000,000
2	1	0	1.	0	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan</i>			Jumlah Dokumen Hasil	Pangkalpinang		3		Rp25,000,000				3		Rp25,000,000

					<i>Sistem Informasi Kepegawaian</i>				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi pepegawaian										
2	1	0	1.	0	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Pangkalpinang		16		Rp80,000,000				16		Rp80,000,000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1.</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (Diskominfo)</b>		<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Adminstras Umum Perangkat Daerah (Diskominfo)</b>		Pangkalpinang		<b>90</b>		<b>Rp626,000,000</b>				<b>90</b>		<b>Rp686,000,000</b>
2	1	0	1.	0	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang		3		Rp20,000,000				3		Rp20,000,000
2	1	0	1.	0	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang		5		Rp60,000,000				5		Rp65,000,000



2	1	0	1.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang		4		Rp60,000,000				4		Rp65,000,000
2	1	0	1.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pangkalpinang		4		Rp45,000,000				4		Rp45,000,000
2	1	0	1.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pangkalpinang		12		Rp15,000,000				12		Rp15,000,000
2	1	0	1.	0	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pangkalpinang		2		Rp66,000,000				2		Rp66,000,000
2	1	0	1.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamunya			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamunya	Pangkalpinang		12		Rp60,000,000				12		Rp60,000,000
2	1	0	1.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Pangkalpinang		12		Rp300,000,000				12		Rp350,000,000

					Konsultasi SKPD				Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
2	1	0	1.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskominfo)		Jumlah Barang Milik Daerah urusan Pemerintah yang diadakan (Diskominfo)			90		Rp630,000,000				90		Rp630,000,000
2	1	0	1.	0	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pangkalpinang	3		Rp300,000,000				3		Rp300,000,000
2	1	0	1.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pangkalpinang	4		Rp80,000,000				4		Rp80,000,000
2	1	0	1.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pangkalpinang	3		Rp250,000,000				3		Rp250,000,000

2	1	0	1.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(Diskominfo)		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(Diskominfo)	Pangkalpinang		9		Rp 2,160,000,000.00				9		Rp 2,160,000,000.00
2	1	0	1.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkalpinang		12		Rp 10,000,000.00				12		Rp 10,000,000.00
2	1	0	1.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pangkalpinang		12		Rp 600,000,000.00				12		Rp 600,000,000.00
2	1	0	1.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang		12		Rp 50,000,000.00				12		Rp 50,000,000.00
2	1	0	1.	0	Penyediaan Jasa		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Pangkalpinang		12		Rp 1,500,000,000.00				12		Rp 1,500,000,000.00



					Dinas Operasional atau Lapangan			dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya										
2	1	0	1.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20		Rp 60,000,000				20	Rp 60,000,000
2	1	0	1.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi			2		Rp 250,000,00 0				2	Rp 250,000,00 0
2	1	0	1.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Pangkal pinang		2		Rp 200,000,00 0				2	Rp 200,000,00 0

2	1	0	1.	1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					6		Rp 200,000,00 0			6		Rp 200,000,00 0
---	---	---	----	---	---	--	--	--	--	---	--	-----------------------	--	--	---	--	-----------------------

### Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Presentase masyara kat yang menjadi sasaran penyeba rluasan informas i publik			95%			<b>Rp10,850, 000,000</b>			95%		<b>Rp11,000, 000,000</b>
2	1	0	1.		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemda Provinsi	Presentase penyebarnya n informasi kebijakan/progr am/kegiatan pimpinan dan perangkat daerah melalui saluran			70			Rp 10,850,00 0,000.00			70		Rp 11,000,00 0,000.00

komunikasi yang tersedia																			
2	1	0	1.	0	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pangkalpinang		12		Rp 50,000,000.00				12		Rp 200,000,000.00
2	1	0	1.	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pangkalpinang		3		Rp 4,200,000,000.00				3		Rp 4,200,000,000.00
2	1	0	1.	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pangkalpinang		4		Rp 1,200,000,000.00				4		Rp 1,200,000,000.00
2	1	0	1.	0	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	Pangkalpinang		3		Rp 1,500,000,000.00				3		Rp 1,500,000,000.00

									Informasi Publik											
2	1	0	1.	1	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pangkalpinang		100		Rp 200,000,00 0.00				100		Rp 200,000,00 0.00	
2	1	0	1.	1	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Pangkalpinang		1		Rp 1,200,000,00 00.00				1		Rp 1,200,000,00 00.00	
2	1	0	1.	1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Pangkalpinang		3		Rp 2,500,000,00 00.00				3		Rp 2,500,000,00 00.00	



2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik.			80			Rp5,125,000,000		80		Rp5,396,250,000
2	1	0	1.		<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase PD layanan administrasi dan layanan publik yang memanfaatkan domain dan subdomain Pemda.</b>		70			Rp610,000,000		70		Rp640,500,000
2	1	0	1.	0	<i>Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi</i>			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Pangkal pinang	10		Rp80,000,000		10		Rp84,000,000

2	1	0	1.	0	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pangkalpinang		2		Rp80,000,000			2		Rp84,000,000
2	1	0	1.	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pangkalpinang		34		Rp450,000,000			34		Rp472,500,000
2	1	0	1.	0	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provins	Presentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah					50		Rp4,515,000,000			50		Rp4,755,750,000

2	1	0	1.	0	<i>Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pangkalpinang		1		Rp200,000,000			1		Rp215,000,000
2	1	0	1.	0	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i>			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Pangkalpinang		1		Rp3,500,000,000			1		Rp3,675,000,000
2	1	0	1.	0	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Pangkalpinang		1		Rp350,000,000			1		Rp372,500,000
2	1	0	1.	0	<i>Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pangkalpinang		1		Rp150,000,000			1		Rp157,500,000

								yang Dikembangka n											
2	1	0	1.	0	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</i>			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Pangkalpinang		10		Rp200,000,000				10		Rp215,000,000
2	1	0	1.	1	<i>Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pangkalpinang		1		Rp115,000,000				1		Rp120,750,000

## Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

2	2	0			PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Presenta se perangk at daerah yang menggu nakan data statistik sektoral dalam menyusu n perenca naan dan evaluasi pemban gunan daerah			60		Rp305,000, 000			60		Rp383,250, 000
2	2	0	1.		Kegiatan Penyelenggara an Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi		Persentase OPD yang menghasilkan data sesuai Prinsip satu data indonesia		75		Rp305,000, 000			75		Rp383,250, 000

2	2	0	1.	0	SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pangkal pinang		<b>1</b>		Rp100,000,000				<b>1</b>		Rp84,000,000
2	2	0	1.	0	SubKegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	Pangkal pinang		<b>10</b>		Rp80,000,000				<b>10</b>		Rp84,000,000
2	2	0	1.	0	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Pangkal pinang		<b>68</b>		Rp125,000,000				<b>68</b>		Rp131,250,000
2	2	0	1.	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	Pangkal pinang		<b>100</b>		Rp0				<b>100</b>		Rp84,000,000

## Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

2	2	0			<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA N INFORMASI</b>	Presenta se tingkat keaman an informas i pemerin tah daerah				65%			Rp716,000, 000			65%		Rp748,000, 000
2	2	0	2.		Kegiatan Penyelengga an Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta		Persentase Penerapan Proteksi Keamanan Informasi Pemerintah				75		Rp656,000, 000				75	Rp685,000, 000
2	2	0	2.	0	<i>Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah</i>			<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah</i>	Pangkal pinang		3		Rp300,000, 000				3	Rp315,000, 000

					Daerah Kabupaten/Ko ta			yang Ditetapkan										
2	2	0	2.	0	sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Jumlah Laporan Pelaksanaa n Keamanan Informasi Pemerintah an Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pangkal pinang		<b>1</b>		Rp116,000, 000				<b>1</b>	Rp122,000, 000
2	2	0	2.	0	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta			Jumlah Laporan Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah an Daerah Provinsi	Pangkal pinang		<b>1</b>		Rp240,000, 000				<b>1</b>	Rp248,000, 000





2	2	0	2.		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi		Presentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi			85		Rp60,000,000				85		Rp63,000,000
2	2	0	2.	0	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Pangkalpinang	27		Rp60,000,000				27		Rp63,000,000



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Renja tahun 2023 ini dilaksanakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dimana berpedoman pada renstra Diskominfo untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju serta berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Diskominfo tahun lalu dan hasil evaluasi renja Diskominfo tahun berjalan agar dapat memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan renja Diskominfo dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Diskominfo.

Penetapan program dan kegiatan dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja ini didasarkan atas prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan isi serta arah kebijakan pembangunan provinsi yang telah tertuang dalam Renstra Diskominfo, dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja ini diutamakan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini, program/kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembanguna Daerah dan berpedoman pada Renstra PD. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang nantinya akan di usulkan ke BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dipandang dari sisi anggaran sampai dengan tahun 2022 jumlah anggaran Diskominfo relatif terbatas, apalagi bila dibandingkan dengan target untuk mengejar berbagai ketertinggalan terutama untuk mengimbangi percepatan perubahan dan perkembangan di bidang teknologi informasi yang meliputi perangkat hardware, software dan jaringan infrastruktur, peningkatan SDM TIK. Diskominfo memfokuskan Renja tahun 2022 pada penguatan integrasi TIK, hal ini didorong dari perkembangan TIK global, dan didorong oleh pandemic Covid-19 yang menjadikan kebutuhan teknologi digital sangat

penting dalam pertahanan perekonomian daerah, salah satunya melalui pengembangan pusat data (*Data Center*).

Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini sehingga *outcome* yang diharapkan dapat tercapai. Perubahan dan dinamika perkembangan TIK yang pesat tentu juga akan menjadi tantangan bagi Diskominfo, tetapi dengan dukungan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di internal Diskominfo beserta seluruh pemangku kepentingan terkait, diharapkan Langkah-langkah pencapaian kinerja dapat lebih *agile* dan tepat sasaran.

Demikianlah Rancangan Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pangkalpinang, Juli 2022  
KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG,



Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI  
NIP. 19640915 199002 1 002